

POTRET

Tekan Angka Stunting

WAKIL Bupati (Wabup) Ketapang, Farhan, mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut mengentaskan stunting di Ketapang. Meski tidak mudah, kerja sama dan kerja keras semua pihak terkait dapat menekan dan menurunkan angka stunting di Ketapang. Saat ini, angka stunting di Ketapang berada pada 20 persen.



Farhan

Farhan mengatakan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya mereka gencar melakukan sosialisasi, pendampingan dan pemenuhan kebutuhan gizi. "Kita ingin meningkatkan kualitas SDM. Mencegah terjadinya stunting. Salah satunya saat masyarakat

yang ingin melakukan pernikahan dilakukan pembinaan. Kemudian juga dengan gizi, pola hidup, dan sebagainya yang merupakan *variable* pencegahan stunting," katanya.

Dia menegaskan, saat ini angka stunting di Ketapang berada di 20 persen. Sementara Pemerintah Pusat menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen. "Kesepakatan nasional ingin menurunkan angka stunting 14 persen. Sesungguhnya data nasional itu tinggi jika diturunkan ke kabupaten. Di Ketapang sendiri, stunting masih berada di angka 20 persen," jelasnya.

"Angka tersebut juga sudah turun dibandingkan tahun-tahun lalu. Kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya semakin turun. Dengan pelatihan dan sosialisasi oleh dinas terkait, tim pendamping, dan stakeholder kepada masyarakat, kita berharap bisa menekan angka stunting di Ketapang mencapai 14 persen," lanjut Farhan.

Dia menambahkan, untuk menekan angka 20 menjadi 14 persen, memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, kerja sama semua pihak, menurut dia, diperlukan untuk mencapai target tersebut. "Dari angka 20 persen menjadi 14 persen itu terlalu berat. Harus tetap berdasarkan standar sesuai dengan kemampuan petugas dan kemampuan keuangan dan sebagainya," ungkapnya.

"Yang terpenting adalah pemahaman masyarakat terhadap stunting. Jika masyarakat juga memahami, masyarakat bisa melakukan langkah-langkah terjadinya stunting. Sehingga angka stunting di Ketapang bisa ditekan," tambah Farhan.

Oleh karena itu, dia mengajak kepada semua pihak terkait untuk bersama-sama mencegah terjadinya stunting terhadap anak. "Ini memang memerlukan kerja keras dan kerja sama. Dengan demikian, angka stunting dapat ditekan dan kualitas SDM Ketapang mampu bersaing dengan daerah lainnya," pungkasnya. (afi)

Mediasi Penganiayaan Anak Anggota DPRD

KETAPANG - Sejak resmi dilaporkan ke kepolisian dua pekan lalu, kasus dugaan penganiayaan yang menimpa anak Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang, hingga kini terus berjalan. Polisi juga sudah melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari memanggil para saksi, visum, termasuk memeriksa kamera pengawas (CCTV).

Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Muhammad Yasin, memastikan kasus dugaan penganiayaan tersebut masih terus berlanjut. Pihaknya masih

melakukan pendalaman terkait kasus itu. "Kita sudah memanggil lima sampai enam orang saksi, termasuk terlapor (DI) juga ikut diperiksa," kata Yasin, kemarin (7/6) di Mapolres Ketapang.

Yasin menjelaskan, para saksi membenarkan bahwa mereka berada di lokasi saat dugaan penganiayaan itu terjadi. Namun, dia menyayangkan, para saksi mengaku tidak melihat secara jelas lantaran saat itu kondisi gelap. Sementara dari hasil visum, mereka mendapati luka memar di leher korban. Selain itu juga,

polisi mengecek kamera pengawas yang terdapat di sekitar lokasi kejadian. "Karena saat itu gelap, beberapa orang mengaku tidak melihat, makanya kita juga periksa CCTV. Visum sudah keluar. Memang ada perlakuan seperti memar bekas cakar itu di leher," tegasnya.

Kendati pemeriksaan telah rampung, pihaknya masih membuka jalur mediasi. Sebelum penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika pada mediasi kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk damai, maka proses hukum akan mereka teruskan.

"Upaya penyelidikan masih terus bergulir, tapi kita ketemu-ketemu lebih dahulu untuk dimediasi. Kalau tidak ada jalan temu, penegakan hukum menjadi jalan terakhir," ungkap Yasin.

Jika terduga pelaku terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat mereka jerat dengan pasal 351 KUH Pidana. Hukumannya,



Muhammad Yasin

menurut dia, paling lama 2 tahun delapan bulan penjara. (afi)

Kembali Enam Pelajar Terima Program Beasiswa Peduli Orangutan Dikader jadi Duta Penyebar Virus Konservasi di Tanah Kayong

KETAPANG - Yayasan Palung bekerjasama dengan Orangutan Republik Foundation kembali memberikan beasiswa kepada putra-putri Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Pelajar yang memenuhi kualifikasi akan diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.

Beasiswa ini merupakan Program Beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan Barat (West Bornean Orangutan Caring Scholarship). Sejak 2012 hingga 2022, sudah 54 orang mahasiswa penerima beasiswa WBOCS. Sebanyak 17 orang di antaranya telah lulus dan menjadi sarjana.

Di tahun 2022 ini, enam kembali terpilih dan mendapat Beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan Barat atau WBOCS tahun 2022. Keenam penerima beasiswa WBOCS melakukan penandatanganan kesepakatan beasiswa WBOCS bersama Yayasan Palung dan Orangutan Republik Foundation. Selain melakukan penandatanganan kesepakatan, dilakukan juga presentasi perkembangan terkait beasiswa yang telah dilakukan sejak 2012 hingga 2022.

Enam penerima beasiswa WBOCS tahun 2022 adalah Noni

dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir, Elin Saputri dari SMA Negeri 1 Sungai Laur, Iqbal Aryanto dari SMA Negeri 3 Ketapang, Maria Angela Canthika Putri dari SMA Negeri 1 Ketapang, Rianti Sandriani dari SMA Negeri 2 Sukadana, dan Galih Triyoga Putra dari SMA Negeri 1 Sandai. Noni, Elin Saputri, dan Galih Triyoga Putra telah lulus di Fakultas Kehutanan Untan. Sementara tiga orang sedang menunggu pengumuman UTBK Rianti Sandriani mengambil Prodi Kehutanan, Iqbal Aryanto Prodi Hukum, dan Maria Angela Canthika Putri Prodi Hubungan Internasional Fisip Untan.

Direktur Yayasan Palung Edi Rahman, mengucapkan selamat kepada enam penerima Beasiswa WBOCS tahun 2022. Dia berpesan kepada penerima WBOCS untuk selalu fokus belajar sesuai target empat tahun kuliah, menjaga nama baik Yayasan Palung, berkontribusi untuk peduli pada lingkungan dan orangutan. "Yang paling penting adalah menjaga nama baik orangtua, YP, OURF dan almamater," pesan Edi.

Bagi penerima WBOCS nantinya yang akan melakukan penelitian, sudah bisa melakukan binaan Yayasan Palung yang ada di wilayah Simpang Hilir, Kabu-

paten Kayong Utara.

Gary Shapiro, president Orangutan Republik Foundation (OURF) mengapresiasi kepada Yayasan Palung yang telah bekerjasama dalam menjalankan program beasiswa WBOCS dengan sangat baik. "Semoga program WBOCS bisa terus berlanjut dan menciptakan sarjana-sarjana yang memiliki komitmen peduli terhadap lingkungan dan orangutan," harapnya.

Dia juga berharap kepada penerima WBOCS 2022 untuk menyelesaikan tanggung jawabnya selama menjalani kuliah. "Semoga semakin banyak orang yang mendukung dan membantu program beasiswa WBOCS. Semoga penerima program ini bisa terus bertambah dari tahun ke tahun," lanjutnya.

Widiya Octa Selfiany, manajer Program Pendidikan Lingkungan dan Kampanye Kesadaran Konservasi Yayasan Palung mengatakan, penganugerahan WBOCS ini sebagai program Yayasan Palung yang sangat diharapkan dan berkelanjutan oleh orang tua mahasiswa yang anaknya berprestasi. Terutama, dia menambahkan, masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Ketapang dan Ka-

bupaten Kayong Utara.

"Penerima beasiswa WBOCS diharapkan untuk selalu menjadi perpanjangan tangan Yayasan Palung untuk menyebarkan virus-

virus konservasi di Tanah Kayong. Selain itu juga semoga penerima WBOCS bisa menjadi agen perubahan di masyarakat," harapnya. (afi)

Enam penerima beasiswa WBOCS tahun 2022

Noni dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir
Elin Saputri dari SMA Negeri 1 Sungai Laur
Iqbal Aryanto dari SMA Negeri 3 Ketapang
Maria Angela Canthika Putri dari SMA Negeri 1 Ketapang
Rianti Sandriani dari SMA Negeri 2 Sukadana
Galih Triyoga Putra dari SMA Negeri 1 Sandai



ISTIMEWA

PENERIMA BEASISWA: Enam penerima beasiswa WBOCS tahun 2022 diabadikan bersama dengan para Pengurus Yayasan Palung dan Orangutan Republik Foundation.

KAYONG UTARA

PETUAH

Perjuangkan Honorer Daerah

PENGHAPUSAN tenaga honorer tahun 2023 mendapat tanggapan serius Bupati Kayong Utara, Citra Duani. Menyusul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.

SM.02.03/2022 yang dikeluarkan pada 31 Mei 2022 tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini tetap berusaha sungguh-sungguh untuk mencari solusi terbaik dalam memperjuangkan tenaga honorer daerah.

Langkah-langkah yang diambil Pemkab saat ini, di antaranya, melalui BKPSDM melakukan pemetaan tenaga kontrak berdasarkan usia dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar penyusunan formasi CPNS maupun PPPK. Mereka juga mengusulkan formasi untuk penerimaan tahun 2022 hingga 2023. "Kami menyadari dengan jumlah ASN yang terbatas, tentunya tenaga honorer sangat membantu pemerintah daerah," jelas Citra.

Untuk 2021, Pemkab telah mengusulkan sebanyak 351 formasi PPPK. Diantaranya usulan PPPK untuk Satpol PP dan BPBD.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab yakni dengan mengirimkan surat resmi ke Kemenpan RB, untuk meminta jadwal audiensi secara langsung terkait masalah ini. "Surat resmi sudah kita kirim ke Kemenpan RB. Kita menunggu jadwal dari mereka," jelas pria yang pernah menjadi ASN Pemprov Kalbar ini.

Peran honorer, diakui Citra, masih sangat dibutuhkan, karena membantu jalannya program pemerintah daerah. Sebab, para honorer, menurut dia, juga menutupi kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang setiap tahun berkurang karena pensiun. Sedangkan, kuota penambahan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini dinilai dia, masih tak sebanding dengan kekurangan SDM. Untuk tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK solusi yang akan diambil oleh Pemkab dilakukan melalui dengan tenaga alih daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga "Kita mencoba melalui KPN yang ada di Kayong Utara," tutupnya. (dan)



Citra Duani

Cegak PMK, Distanak Lakukan Penyemprotan

SUKADANA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) terus melakukan pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Kayong Utara. Plt. Kepala Distanak, Azhari mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kayong Utara terkait virus yang menyerang hewan ternak. Bahkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan posko pengaduan terhadap masyarakat yang menemukan gejala PMK pada hewan ternak milik masyarakat.

"Kita sudah melakukan antipapenyebaran PMK ini. Petugas kita datang ke Kecamatan hingga

peternak masyarakat secara langsung, memberikan pengarahan, edukasi terhadap PMK yang menyerang hewan ternak ini. Alhamdulillah sejauh pemantauan kita belum di dapati adanya hewan ternak yang positif PMK maupun sekedar gejala," kata Azhari, Rabu (8/6) di Sukadana.

Saat ini, lanjut dia terpantau sudah 9 kabupaten/kota yang terpantau kasus PMK. Kayong Utara sendiri, menurut dia, masih berstatus zona hijau alias bebas dari kasus PMK. Namun memasuki Iduladha, konsumsi daging masyarakat, dipastikan dia akan tinggi, sehingga hal antisipasi secara dini akan dilakukan untuk tetap mempertahankan Kayong Utara bebas PMK.

PENYEMPROTAN: Petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara saat melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Kayong Utara.



ISTIMEWA

"Lebar haji kita khawatirkan hewan ternak untuk kurban akan banyak, dan kita mengantisipasi masuknya hewan kurban dari daerah luar. Untuk itu sejak dini kita sudah memetakan daerah-daerah yang rawan

masuknya hewan kurban dari luar. Kita menyarankan untuk memaksimalkan hewan ternak yang ada di dalam saja (Kayong Utara, Red) untuk kurban nanti, karena sudah kita pantau sejak dini," katanya.

Mengenai hal ini Distanak pun sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke lokasi lokasi kandang peternak yang ada di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana hingga ke desa-desa lainnya. (dan)

Dinas Pendidikan Tambah Mapel *Ecopolybag* di Sekolah

SUKADANA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan memasukan materi *ecopolybag* dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah.

"Untuk bidang kami *sh*, ini merupakan salah satu wacana kami ke depan itu ada pengembangan muatan lokal khususnya tentang pendidikan lingkungan hidup salah satu materi yang akan kita masukan terkait *ecopolybag* mudah-mudahan masyarakat dibina Tanagupa bisa menjadi pemateri tentang *ecopolybag* di sekolah, jadi kita minta bantu untuk jadi guru bantu

kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan di Sukadana.

Menurutnya, perlu sinergitas antara masyarakat yang selama ini menjadi pahlawan lingkungan hidup yang dibina Tanagupa dengan dunia pendidikan, agar pengetahuan anak-anak tentang mencintai alam dari sejak dini telah ditanamkan di sekolah-sekolah.

"Nanti adalah sinergitas antara masyarakat dan dunia pendidikan, seperti kelompok binaan Tanagupa bisa menjadi pemateri tentang *ecopolybag* di sekolah, jadi kita minta bantu untuk jadi guru bantu

yang bisa menyampaikan materi seputar *ecopolybag* seperti bagaimana membuat *polybag* ramah lingkungan," kata dia

Dikatakan dia, implementasi awal yang diharapkan dari mata pelajaran tersebut berawal dari sekolah agar mengubah pola lama ke pola yang baru agar dapat mengurangi sampah di lingkungan belajar mengajar.

"Harapan di siswa *polybag* plastik mudah-mudahan di sekolah bisa memakai *ecopolybag* sebagai wadah untuk bertanam karena di sekolah juga ada toganya juga kan," katanya. (dan)



BETAHTA.ID

ECOPOLYBAG: Salah satu contoh *ecopolybag*, yakni *polybag* yang dibuat menggunakan bahan ramah lingkungan.